

MATRIK BUKU III RPJMN 2010-2014 WILAYAH PAPUA
ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, WILAYAH, STRATEGI PEMBANGUNAN, DAN KEGIATAN PRIORITAS

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
<p>Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dominasi peran sektor sumber daya alam tak terbarukan dalam perekonomian Provinsi Papua • Belum optimalnya industri unggulan kakao dan kopi sebagai motor penggerak perekonomian di Provinsi Papua • Belum optimalnya peran industri unggulan hasil laut sebagai penggerak perekonomian Provinsi Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sektor dan komoditas unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Papua 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sentra produksi pertanian 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian • Pengembangan areal pertanian baru • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau • Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau • Pengambilan langkah-langkah konkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim • Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh dibawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu • Penyelesaian pembangunan Lintas Papua • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda • Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku • Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum 2013 • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok • Revitalisasi Pasar Tradisional

III.M.8-2

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional • Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor • Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai • Pengelolaan dan Pembangunan Kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten untuk mendukung transaksi elektronik • Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka \ • Pengembangan Energi Alternatif <ul style="list-style-type: none"> ❖ Listrik Desa (EBT) ❖ PLTS Tersebar ❖ PLTS Terpusat ❖ PLTMH (kW) ❖ PLT Angin (kW) • Pembangunan unit pengolahan Biofuel • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi) <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan penerimaan dari hasil sumber daya alam pertambangan untuk pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian • Pembangunan prasarana jaringan jalan Jayapura-Nimbrokang-Sarmi dan Jayapura-Wamena-Mulia
		<ul style="list-style-type: none"> • Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sentra produksi perikanan laut 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau • Pengambilan langkah-langkah konkrit terkait adaptasi danantisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim • Penyelesaian pembangunan Lintas Papua • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda • Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum 2013 • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Pasar Tradisional • Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional • Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor • Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai • Pengelolaan dan Pembangunan Kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten untuk mendukung transaksi elektronik • Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA

III.M.8-6

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka • Pengembangan Energi Alternatif <ul style="list-style-type: none"> ❖ Listrik Desa (EBT) ❖ PLTS Tersebar ❖ PLTS Terpusat ❖ PLTMH (kW) ❖ PLT Angin (kW) • Pembangunan unit pengolahan Biofuel • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi) <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penguasaan teknologi perikanan • Pembangunan prasarana pendukung pembekuan ikan • Peningkatan distribusi input produksi (bahan bakar, armada perahu) • Peningkatan interkoneksi sentra produksi dan pusat industri pengolahan hasil laut
			<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan industri pengolahan perikanan laut 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau • Penyelesaian pembangunan Lintas Papua • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda • Penurunan tingkat kecelakaan transportasi • Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku • Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum 2013 • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok • Revitalisasi Pasar Tradisional • Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional • Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Bidang Kepabeanaan • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional • Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor • Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai • Pengelolaan dan Pembangunan Kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten untuk mendukung transaksi elektronik • Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah • Menyempurnaan peraturan ketenagakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan (pusat) dengan kebijakan/ peraturan daerah • Penguatan lembaga hubungan industrial: (a) mendorong pembentukan lembaga bipartite; (b) Penguatan perundingan antara perwakilan pekerja dan pengusaha dengan meningkatkan teknik-teknik bernegosiasi; (c) Peningkatan kualitas penyelesaian perselisihan • Penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan sesuai standard an manajemen K3 • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW)

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka • Pengembangan Energi Alternatif <ul style="list-style-type: none"> ❖ Listrik Desa (EBT) ❖ PLTS Tersebar ❖ PLTS Terpusat ❖ PLTMH (kW) ❖ PLT Angin (kW) • Pembangunan unit pengolahan Biofuel • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi) • Pembangunan Jaringan Gas <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penguasaan teknologi pengolahan perikanan laut
		<ul style="list-style-type: none"> • Papua Barat • Papua 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan potensi wisata bahari Raja Ampat dan Wisata Budaya 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau • Penyelesaian pembangunan Lintas Papua • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan tingkat kecelakaan transportasi • Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum 2013 • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis) • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional • Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten untuk mendukung transaksi elektronik • Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW • Penguatan lembaga hubungan industrial: (a) mendorong pembentukan lembaga bipartite; (b) Penguatan perundingan antara perwakilan pekerja dan pengusaha dengan meningkatkan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>teknik-teknik bernegosiasi; (c) Peningkatan kualitas penyelesaian perselisihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan sesuai standard an manajemen K3 • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka • Pengembangan Energi Alternatif <ul style="list-style-type: none"> ❖ Listrik Desa (EBT) ❖ PLTS Tersebar ❖ PLTS Terpusat ❖ PLTMH (kW) ❖ PLT Angin (kW) • Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan • Pengembangan Pengelolaan Permuseuman • Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi • Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan interkoneksi tujuan wisata dan kota-kota besar nasional • Peningkatan fasilitas penunjang pariwisata • Peningkatan promosi wisata • Penyiapan sumber daya manusia bidang pariwisata
Pengamanan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah perbatasan <ul style="list-style-type: none"> • Minimnya fasilitas di daerah perbatasan • Rendahnya aksesibilitas penduduk di pedalaman, tertinggal dan perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan wilayah perbatasan dengan memadukan peningkatan kesejahteraan dan keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Papua • Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan kepastian hukum internasional atas pemanfaatan SDA pada Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik • Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan • Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010 Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana patroli perbatasan laut
			<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola kawasan perbatasan darat dengan memadukan pendekatan keamanan dan kesejahteraan 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan • Pengentasan daerah tertinggal <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana lintas batas, pertahanan, dan keamanan • Penataan administrasi kependudukan • Peningkatan akses pendidikan • Peningkatan akses pelayanan kesehatan • Peningkatan pelatihan ketrampilan kerja • Peningkatan aksesibilitas dengan membangun sistem jaringan transportasi • Pengembangan keterkaitan antara wilayah perbatasan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi wilayah (PKN, PKW)
<p>Optimalisasi tata pemerintahan yang baik dalam koridor otonomi khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum terimplementasikannya UU Otonomi Khusus secara menyeluruh di Provinsi Papua dan Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan otonomi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Papua • Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas proses legislasi 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan administrasi pejabat negara di daerah dan DPRD • Pendidikan dan pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kinerja Kelembagaan Demokrasi • Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penegakan 	<p>Prioritas Nasional</p>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			<p>hukum, HAM, serta transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah • Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah • Pembinaan administrasi pejabat negara di daerah dan DPRD • Pendidikan dan pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik • Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen • Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen • Menyempurnaan peraturan ketenagakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan (pusat) dengan kebijakan/ peraturan daerah • Penguatan lembaga hubungan industrial: (a) mendorong pembentukan lembaga bipartite; (b) Penguatan perundingan antara perwakilan pekerja dan pengusaha dengan meningkatkan teknik-teknik bernegosiasi; (c) Peningkatan kualitas penyelesaian perselisihan • Penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan sesuai standard an manajemen K3
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan publik 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus • Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan • Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah • Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah • Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah • Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah • Pengelolaan Informasi Manajemen Kependudukan • Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan
<p>Kualitas sumberdaya manusia dan tingginya persentase kemiskinan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya IPM • Tingginya persentase dan kedalaman kemiskinan di perdesaan • Rendahnya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Papua dan Papua Barat • Tingginya potensi busung lapar dan gizi buruk 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Papua • Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas penduduk perdesaan dan rumah tangga miskin baik secara individual maupun berkelompok <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • memperluas kesempatan dan peluang pengembangan ekonomi lokal 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga (PKH, bantuan pangan, jamkesmas, beasiswa anak keluarga berpendapatan rendah, PAUD • Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas UMKM yang berpotensi menyerap tenaga kerja penduduk miskin • Peningkatan pelatihan ketrampilan kerja • Pengembangan kewirausahaan di wilayah perdesaan • Peningkatan pendampingan (fasilitasi) masyarakat • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan publik <p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan areal pertanian baru • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<p>kemampuan pemasarannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau • Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau • Penyelesaian pembangunan Lintas Papua • Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku • Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum 2013 • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Kepastian hukum Pembentukan Peraturan perundang-undangan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok • Revitalisasi Pasar Tradisional

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Pembangkit PLTD (Unit/kW) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Induk Transmisi Tenaga Listrik (kms) • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui Gardu Distribusi kVA • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTM • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui JTR • pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka • Pengembangan Energi Alternatif <ul style="list-style-type: none"> ❖ Listrik Desa (EBT) ❖ PLTS Tersebar ❖ PLTS Terpusat ❖ PLTMH (kW) ❖ PLT Angin (kW) • Pembangunan unit pengolahan Biofuel • Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (Penyediaan Bahan bakar Bio Energi)

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik • Pengentasan daerah tertinggal <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitasi kemitraan lintas pelaku dalam pengembangan ekonomi lokal • Peningkatan fasilitasi promosi produk wilayah perdesaan
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan cakupan dan sebaran program penanggulangan kemiskinan 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan anggaran PNPB Mandiri dari Rp. 10,3 T pada tahun 2009 menjadi Rp. 12,1 T pada tahun 2010 • Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan • Peningkatan koordinasi dan sinergi program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan kementerian, pemerintah daerah, dan swasta (corporate social responsibility)
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas sumber daya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> • Papua • Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan ketrampilan kerja 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan APM Pendidikan Dasar, Menengah dan SMA • Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS • Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah • Penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan APK Pendidikan Tinggi • Penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011 • Penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014 • Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul • Revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas quality assurance • Mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran • Mendorong aktivasi peran Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten • Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan • Program remediasi kemampuan mengajar guru • Penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar • Sertifikasi ISO 9001:2008 • Peningkatan kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional • Mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014 • Peningkatan perbandingan guru:murid • Memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013 • Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi • Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca <p>Prioritas Pulau</p>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendidikan vokasional • Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional • Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan • Penyelenggaraan Kursus dan Magang <p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak • Pemberian imunisasi dasar kepada balita • Penyediaan akses sumber air bersih • Peningkatan akses sanitasi dasar berkualitas • Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada tahun 2010 • Perluasan Asuransi Kesehatan Nasional melalui : i) Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Puskesmas; ii) Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit; iii) Dukungan Manajemen Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengembangan Jaminan Kesehatan • Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui klinik pemerintah dan swasta melalui: i) Pembinaan kesertaan ber KB; ii) Penguatan Sumberdaya Penyelenggara program KB; iii) Peningkatan advokasi pada stakeholder; iv) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk dan KB; v) Pengembangan Media Komunikasi; vi) Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor dan pemda; viii) Peningkatan kemitraan dengan sektor swasta, LSM, dan masyarakat; viii) Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB • Penurunan prevalensi Tuberculosis • Penurunan kasus malaria (Annual Parasite Index-API)

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian prevalensi HIV pada populasi dewasa • Penurunan prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada anak balita • Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian insentif bagi tenaga medis yang ditempatkan di perdesaan, daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan • Peningkatan edukasi masyarakat tentang pola hidup sehat • Peningkatan kualitas lingkungan permukiman
Tingginya prevalensi HIV/AIDS <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kasus AIDS/HIV di perkotaan dan perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian HIV/AIDS 	<ul style="list-style-type: none"> • Papua • Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan upaya pencegahan penularan HIV/AIDS 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan informasi dan edukasi masyarakat • Penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan untuk pencegahan penularan HIV/AIDS • Penyediaan prasarana dan sarana kesehatan bagi penderita HIV/AIDS • Pemberdayaan kelompok ODHA
Tingginya potensi pelanggaran hak asasi manusia berbasis ikatan adat dan komunal <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan dan hak asasi manusia dan resiko konflik pertanahan di Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia 	<ul style="list-style-type: none"> • Papua • Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen • Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
Papua dan Papua Barat				<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Penataan kelembagaan desa untuk penguatan aparat desa
			<ul style="list-style-type: none"> • Menghormati dan memperkuat lembaga adat 	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan lembaga adat dalam penyelesaian konflik • Peningkatan partisipasi lembaga adat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan • Penghormatan terhadap hukum adat
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerjasama antara kepolisian dan pemuka adat dalam penanganan konflik 	Prioritas Pulau <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan budaya harmonis • Pencegahan dan menanggulangi kejahatan dan tindak pelanggaran hukum • Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi intelijen (prioritas nasional) • Peningkatan keamanan • Pemberdayaan community policing
Meningkatnya kebutuhan ketahanan pangan <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya luas panen dan produksi tanaman pangan di Provinsi Papua dan Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketahanan pangan di tingkat wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Papua • Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan 	Prioritas Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian • Pengembangan areal pertanian baru • Penertiban, serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar • Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Penyediaan pembiayaan yang terjangkau • Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau • Pengambilan langkah-langkah konkrit terkait adaptasi danantisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim • Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku • Peningkatan Deregulasi Kebijakan • Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) • Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal • Administrasi Badan Hukum • Revitalisasi Pasar Tradisional • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
			<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat interaksi perdagangan antarwilayah 	<p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan teknologi tepat guna • Pengendalian konversi lahan pertanian terutama yang beririgasi teknis • Perbaikan distribusi input produksi pertanian (bibit unggul, pupuk, pestisida, alat-alat pertanian) <p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya • Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda • Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia Bagian Timur sebelum 2013 • Penyediaan Jasa Telekomunikasi • Peningkatan Deregulasi Kebijakan Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok • Revitalisasi Pasar Tradisional • Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional • Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Bidang Kepabeanaan (Prioritas Nasional) • Pengembangan dan penetapan sistem logistik nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut (Pembangunan kapal perintis dan subsidi operasi perintis)

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan • Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan Nasional • Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeaan dan Cukai • Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten untuk mendukung transaksi elektronik • Koordinasi pengembangan dan penerapan sistem National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW
			<ul style="list-style-type: none"> • Diversifikasi pangan 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi • Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah • Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan • Pengambilan langkah-langkah konkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi bahan pangan • Pengembangan penelitian inovatif bahan pangan alternatif
<p>Keragaman hayati wilayah Papua dan Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya keragaman hayati di Provinsi Papua dan Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian dan pemanfaatan keragaman hayati di wilayah Papua 	<ul style="list-style-type: none"> • Papua • Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengarusutnamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan publik 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan langkah-langkah konkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim • Koordinasi pengembangan urusan penataan ruang dan pengembangan wilayah

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	WILAYAH	STRATEGI PENGEMBANGAN	FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS
<ul style="list-style-type: none"> Potensi bencana alam 				<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi <p>Prioritas Pulau</p> <ul style="list-style-type: none"> Penetapan kawasan lindung dan konservasi dalam dokumen rencana tata ruang Penyusunan peraturan perundangan tentang kawasan hutan konservasi Penegakan peraturan dalam pemanfaatan ruang Pengembangan kerjasama penelitian dalam keanekaragaman hayati Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai potensi wisata alam
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam 	<ul style="list-style-type: none"> Papua Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan sistem mitigasi bencana 	<p>Prioritas Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS), mulai 2010 dan seterusnya Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013 Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan Penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana